

## **Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Deskriptif PKK di Kelurahan Katulampa Kota Bogor)**

**Ega Julia Nasution<sup>1</sup> Wika Hardika Legiani<sup>2</sup> Ria Yuni Lestari<sup>3</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [ega5sos11@gmail.com](mailto:ega5sos11@gmail.com)<sup>1</sup> [wikahardikalegiani@gmail.com](mailto:wikahardikalegiani@gmail.com)<sup>2</sup> [riayunilestari@untirta.ac.id](mailto:riayunilestari@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk pembangunan nasional. Banyak cara untuk dapat memberdayakan Perempuan salah satunya melalui organisasi Masyarakat yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pada program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan, untuk mengetahui pelaksanaan prinsip pemberdayaan perempuan di PKK Kelurahan Katulampa, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta bagaimana upaya perbaikan dari program PKK tersebut. Pada penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengimplementasian program PKK dalam memberdayakan perempuan di Kelurahan Katulampa dapat dikatakan cukup berhasil dalam memberdayakan perempuannya walaupun keterlibatan masyarakatnya kurang. Dalam prinsip pemberdayaan perempuan di PKK Kelurahan Katulampa pun masyarakat dan para pelaksana program PKK memiliki kesetaraan dengan tidak membedakan jabatan atau kedudukannya. Dalam pelaksanaan program tentu terdapat hambatan dalam prosesnya, faktor yang menghambat pelaksanaan program PKK adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dan ketersediaan fasilitas transportasi untuk bina wilayah. Hal tersebut dapat diupayakan dengan Kelurahan Katulampa yang memfasilitasi transportasi dan melakukan pendekatan ke masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Perempuan

### **Abstract**

*Women's Empowerment is one of the efforts that the government can make for national development. There are many ways to be able to empower women, one of which is through community organizations, namely Family Welfare Empowerment (PKK) This research aims to find out how the implementation of the Family Welfare Empowerment Program (PKK) in women's empowerment, to find out the implementation of the principles of women's empowerment in the PKK Katulampa Village, and also to find out the inhibiting factors and how to improve the PKK program. In this study, the collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The result of this study is that implementing the PKK program in empowering women in Katulampa Village can be quite successful in empowering women even though community involvement is lacking. In the principle of women's empowerment in the PKK, Katulampa Village, the community and the implementers of the PKK program have equality by not discriminating between their positions or positions. In the implementation of the program, of course, there are obstacles in the process, the factors that hinder the implementation of the PKK program are the lack of participation from the community and the availability of transportation facilities for regional development. This can be pursued with Katulampa Village which facilitates transportation and approaches the community.*

**Keywords:** Implementation, Family Welfare Empowerment (PKK), Women's Empowerment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh setiap komponen bangsa untuk mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional pada dasarnya harus berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar dan tujuan pembangunan nasional. Dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional tersebut diperlukannya keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dengan cara memberdayakannya. Menurut Turni (dalam Zakaria, 2020:56) menyatakan bahwa *civic engagement* dapat memberdayakan Masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses yang mendorong warga negara untuk mampu dalam mengambil Keputusan sesuai dengan situasi lingkungan. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menuju berdaya, dengan kata lain kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya, selain itu pemberdayaan juga memiliki kemampuan untuk merubah system dan struktur sosial, seperti ekonomi, sosial dan politik. Dalam memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.

Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat dan sejahtera. Dengan memberdayakan Perempuan mereka dapat memiliki kemampuan dalam mengembangkan keterampilannya, memiliki kemandirian sehingga mereka mampu dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka dan dapat terlibat dalam mewujudkan Pembangunan nasional. Menurut Hubies (dalam Saugi, 2015:228) pemberdayaan Perempuan adalah Upaya dalam memperbaiki status dan peran Perempuan dalam Pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi Perempuan. Dapat dikatakan pemberdayaan Perempuan merupakan kemampuan Perempuan yang ikut andil dalam berbagai kehidupan. Pemberdayaan sebagai bentuk dari adanya proses Pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa membedakan dari segi apapun.

Dalam memberdayakan Perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melalui organisasi masyarakat. Organisasi Perempuan yang terdapat di dalam masyarakat baik di desa atau kota adalah dengan adanya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Gerakan PKK merupakan Gerakan nasional yang tumbuh dari masyarakat agar dapat mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat Sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesetaraan hukum dan lingkungan. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 10 Program Pokok PKK yang menjadi acuan agar terwujudnya pemberdayaan kesejahteraan dalam keluarga. 10 program pokok PKK tersebut adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup; dan Perencanaan Sehat, ke 10 program tersebut merupakan program yang harus dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pengimplementasian 10 program pokok PKK yang dibagi kedalam 4 Kelompok Kerja (pokja) tentu dijabarkan lagi kedalam beberapa kegiatan program yang akan dilaksanakan ke masyarakat. Penjabaran ke 10 program pokok PKK tersebut harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan di setiap masing-masing daerah. Tiap daerah tentu memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, begitupun dengan pelaksanaan kegiatan programnya pun berbeda, akan tetapi tujuan yang akan dicapai tetap sesuai dengan lingkup 10 Program PKK tersebut.

Implementasi program PKK merupakan proses serangkaian kegiatan yang sudah disusun ataupun direncanakan untuk mencapai tujuan dari program pokok PKK. Dalam

pengimplementasian suatu program adanya factor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari terlaksananya program tersebut, factor tersebut menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (dalam Zulfian, 2014:35) adalah dengan komunikasi, disposisi/ sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi. Setiap para pelaksana program PKK harus dapat menerapkan beberapa factor yang dapat menentukan terlaksananya suatu program PKK tersebut. Untuk mencapai ke 10 program pokok PKK tersebut dalam pelaksanaan implementasinya perlu adanya prinsip dalam kegiatan pemberdayaan Perempuan. Dengan adanya prinsip dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah disepakati dengan TP PKK baik pusat ataupun daerah serta dengan masyarakatnya, oleh karena itu program kegiatan PKK dapat dioptimalkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan tujuan pelaksanaan program yang sudah direncanakan dapat berdaya dan berhasil. Prinsip dalam pemberdayaan Perempuan di dalam masyarakat untuk keberhasilan implementasi program PKK mencakup prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan/ kemandirian dan prinsip berkelanjutan, Maryani (dalam Nisa, 2020:17).

PKK Kelurahan Katulampa merupakan salah satu wilayah di Kelurahan Katulampa tersebut yaitu Kampung Cikeas memenangkan juara satu pada program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat kategori kota pada tahun 2020. Program tersebut merupakan salah satu program dalam meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan yang tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam agar terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PKK Kelurahan Katulampa, mengetahui pelaksanaan prinsip pemberdayaan Perempuan dan mengetahui factor penghambat dari program PKK di Kelurahan Katulampa beserta Upaya perbaikannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi program PKK dalam pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Katulampa. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua PKK Kelurahan Katulampa, kader/anggota PKK, dan masyarakat di wilayah Katulampa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data berupa triangulasi Teknik yaitu observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi, selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dari Ketua, kader /anggota PKK Kelurahan Katulampa dan juga masyarakat wilayah Katulampa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Katulampa, telah mendapatkan jawaban dari rumusan penelitian sebagai berikut:

### **Implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi program PKK dalam pemberdayaan perempuan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terlaksananya implementasi program, yaitu:

1. *Pertama*, Komunikasi. Pada tahap komunikasi yang dilakukan oleh para TP PKK agar berhasilnya tujuan dari program PKK adalah dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat sebelum pelaksanaan program dilakukan. Komunikasi antara TP PKK dengan

masyarakat tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat dalam pelaksanaan program akan membuat implementasi mengalami kendala dan bahkan tidak berhasil.

2. *Kedua*, disposisi/sikap pelaksana. Pada tahap disposisi ini pemilihan pelaksana kegiatan harus dapat bertanggung jawab atas tugas yang dimilikinya, dengan kata lain tetap memiliki dedikasi atas tanggung jawabnya. Akan tetapi PKK tidak memaksa para TP PKK untuk tetap ikut melakukan program PKK. Tidak adanya paksaan TP PKK untuk menjadi TP PKK dikarenakan tidak adanya insentif dari PKK. PKK merupakan kegiatan yang sukarela dalam organisasinya. Jadi yang menjadi TP PKK ialah orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi.
3. *Ketiga*, Sumber daya. Sumber daya merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan program. Sumber daya yang dimiliki tidak hanya harus jumlahnya yang mencukupi tetapi juga perlu juga yang berkompeten. Dengan sumber daya yang memiliki kompetensi dan keterampilan dia akan dapat memahami apa yang harus ia lakukan saat pelaksanaan program PKK, sehingga program dapat tersalurkan ke masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana juga diperlukan untuk menunjang kegiatan program PKK. TP PKK Kelurahan Katulampa memiliki keterampilan dalam masing-masing POKJanya dan di Kelurahan Katulampa juga memiliki ruang rapat bagi para TP PKK untuk mengadakan pertemuan rutin dan sebagainya.
4. *Keempat*, struktur birokrasi. Struktur birokrasi dan setiap program yang diimplementasikan sesuai dengan SOP yang tertera di Buku PKK.

### **Pelaksanaan prinsip pemberdayaan perempuan pada PKK di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur**

Dalam melakukan pemberdayaan diperlukan pula prinsip yang dapat menunjang keberhasilan program dari pemberdayaan tersebut, yaitu dengan adanya prinsip pemberdayaan dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi program PKK dalam pemberdayaan perempuan yaitu:

1. *Pertama*, prinsip kesetaraan. Dalam pelaksanaan program PKK para pelaksana program PKK dengan masyarakat memiliki kesetaraan yang sama. TP PKK tidak membedakan antara dirinya dengan masyarakat, mereka berpikir bahwa kedudukan mereka sama yang berbeda hanyalah pengalamannya saja. Memang TP PKK diberikan pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu dari TP PKK Pusat tetapi hal tersebut tidak dapat di samakan dengan masyarakat yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih luas dan lama dibanding TP PKK tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya TP PKK sendiri menyetarakan dirinya dengan masyarakat tanpa ada rasa mengurui.
2. *Kedua*, prinsip partisipasi. Partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat sangat mempengaruhi implementasi program. Karena jika tidak ada yang berkenan terlibat dalam proses program PKK maka tidak akan ada tujuan yang dicapai. Dalam pelaksanaan program PKK di Kelurahan Katulampa memang untuk keterlibatan dari masyarakatnya masih kurang, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap program PKK yang tentunya bertujuan untuk memberdayakan mereka.
3. *Ketiga*, prinsip Keswadayaan atau kemandirian. Masyarakat tentu mengetahui apa kendala yang ia rasakan sendiri, selain itu mereka juga mengetahui kondisi lingkungannya maka masyarakat sendiri lah yang harus memiliki kesadaran atas kebutuhan yang ia perlukan. Cara TP PKK membantu kemandirian dari masyarakat dengan cara memberdayakan perempuan dalam kegiatan yang ia butuhkan. Program PKK tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada dilapangan.
4. *Keempat*, prinsip berkelanjutan. Dalam semua proses program PKK, TP PKK dan pemerintah mengharapkan masyarakat dapat menerapkan kegiatan dari program PKK tersebut kedalam

kehidupan sehari-harinya. Masyarakat wilayah Katulampa menerapkan beberapa kegiatan yang telah disosialisasikan ke masyarakat itu sendiri contohnya dalam inovasi membuat makanan dari bahan yang banyak dapat ditemukan di kebun oleh masyarakat, ataupun menanam bahan untuk masakan seperti cabai dan sayur-sayuran.

Prinsip-prinsip pemberdayaan ini merupakan hal yang memang harus ditanamkan oleh pra pelaksana implementasi pemberdayaan terutama PKK dalam memberdayakan perempuan agar tercapainya keberhasilan dalam pengimplementasiannya.

### **Faktor Penghambat dan Upaya Perbaikan dalam Pelaksanaan Program PKK**

Dalam pengimplementasian program pasti terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitupun dengan PKK yang melaksanakan program PKK demi terwujudnya 10 Program Pokok PKK dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Faktor penghambat atau kendala yang pertama ialah dalam partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat khususnya perempuan dalam melaksanakan program PKK tidak banyak yang ikut berpartisipasi. Masih saja ada masyarakat yang bersikap bahwa program PKK hanya buang waktu, selain itu kesibukan yang ada didalam masyarakat juga berbeda-beda jadi kesulitan dalam memberdayakan masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat. Kedua, faktor pengambatnya ialah dari perbedaan sosialisasi antara masyarakat perumahan dengan perkampungan. Untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat perumahan tentulah mudah karena dengan latar belakang pendidikan mereka yang mungkin tinggi jadi mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dapat tersampaikan dengan cepat. Walaupun yang menjadi kendalanya ialah masyarakat di perumahan sedikit sekali yang ikut berpartisipasi karena kesibukan dari masyarakat perumahan yang rata-rata bekerja. Sedangkan kalau untuk di daerah perkampungan memang agak sulit menyampaikan informasi secara cepat, masyarakatnya harus disosialisasikan secara perlahan sampai ia benar-benar paham, akan tetapi untuk keterlibatan masyarakat di wilayah perkampungan lebih banyak dibanding dengan perumahan. Kendala yang ketiga adalah dari transportasi, kendaraan merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan program PKK. Untuk ke wilayah mereka menggunakan anggaran untuk menyewa transportasi untuk sampai ke wilayah, tetapi untuk wilayah yang terpencil sulit akses mobil/lewat mobil mereka harus berboncengan 1 motor 3 orang untuk dapat sampai ke wilayah tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan membuat program yang menarik tetapi sesuai dengan acuan 10 program pokok PKK agar masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program PKK. Selain itu TP PKK juga dapat melakukan pendekatan ke masyarakat seperti berkenalan, mengunjungi wilayah tersebut dengan ramah dan mengobrol sehingga masyarakat dapat mengenali para anggota TP PKK sehingga mereka memiliki rasa untuk harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan program PKK. dan yang terakhir ialah kendala kendaraan, kendaraan memang penunjang keberhasilan implementasi program PKK karena termasuk kedalam sarana dan prasarana. Akan tetapi TP PKK Kelurahan Katulampa tetap melewati kendala tersebut, jika memang mengharuskan untuk jalan masuk ke wilayah tersebut mereka akan lakukan. Tetapi pemerintah dapat memberikan fasilitas untuk dapat membantu PKK dalam melaksanakan programnya demi kesejahteraan keluarga.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai analisis implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi program PKK

di Kelurahan Katulampa dapat dikatakan sudah cukup berhasil walaupun keterlibatan masyarakatnya yang kurang akan tetapi sudah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan program PKK. Komunikasi antara pelaksana PKK dengan masyarakat terbilang sudah terkomunikasikan dan terkoordinasikan dengan baik masyarakat mengetahui program PKK dikarenakan TP PKK mensosialisasikannya dengan baik. Selain itu masyarakat juga menerapkan program pelatihan yang telah disosialisasikan PKK menunjukkan bahwa kegiatan implementasi program tersebut berhasil dilakukan. Walaupun memang tidak adanya paksaan bagi para pelaksana PKK untuk tetap menjadi anggota PKK akan tetapi TP PKK melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan program. Dengan keterampilan yang dimiliki TP PKK dan dengan disalurkan kepada masyarakat tentunya dapat menambah pengalaman serta pengetahuan masyarakat terutama perempuan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam mememberdayakan perempuan diperlukannya prinsip sebagai aturan agar pengimplementasian program dapat berhasil.

Pelaksanaan prinsip pemberdayaan perempuan pada PKK Kelurahan Katulampa merupakan salah satu keberhasilan dari program yang dilakukan jika prinsip-prinsip tersebut dipatuhi dan dijalankan. Prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan keberlanjutan merupakan tahapan yang berpengaruh dalam pengimplementasian program pemberdayaan. Memang masyarakat dengan para pelaksana program PKK yaitu TP PKK memiliki kesetaraan, karena TP PKK menempatkan dirinya sebagai masyarakat juga bukan sebagai pemegang pengetahuan ataupun sikap angkuh karena memiliki jabatan sebagai PKK. Dalam PKK Kelurahan Katulampa masyarakat yang terlibat ikut serta untuk berpartisipasi memang tidak banyak akan tetapi dapat mewujudkan implementasi program PKK dengan dibuktikan kemenangannya dalam P2WKSS PKK Kelurahan Katulampa inilah yang mewakilinya.

Dalam pelaksanaan implementasi program PKK tentunya ada hambatan saat pelaksanaannya. Faktor Penghambat dan Upaya Perbaikan program PKK Kelurahan Katulampa. Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program PKK ialah karena kurangnya partisipasi masyarakat. Cara berpikir mereka yang menganggap PKK menerapkan kegiatan tidak penting itu dikarenakan minimnya pengetahuan orang lain mengenai program-program PKK. Selain itu kesibukan setiap orang tentu berbeda, ada yang paginya bekerja ada yang mengurus anak ada yang memberekan rumah banyak alasan yang memang mempengaruhi sulitnya masyarakat untuk ikut bergabung. Kendaraan yang kurang mencukupi merupakan salah satu kendala sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan dari program PKK. Sulitnya akses untuk dapat membina wilayah tersebut akan menyulitkan TP PKK untuk mensosialisasikan dan menambah pengetahuan pada masyarakat di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan dari adanya kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan ke masyarakat agar lebih sering mengenal dan dapat ikut berpartisipasi dalam program PKK yang dilakukan di masing-masing wilayah. Karena jika masyarakat mengenal TP PKK mereka akan lebih senang mengikuti program tersebut, selain itu dalam kendaraannya dari Ketua PKK ataupun Kelurahan Katulampa dapat memfasilitasi kendaraan selain menghemat anggaran juga sebagai kemudahan para TP PKK menjalankan tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, Syafiqah Fakhrun. (2020). *Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pada Pelatihan Batik Shibori di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*.

- Putri,. Sandhika & Oksiana Jatningsih. (2020). *Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menngerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 08, hal 887-901.
- Rofi'i, M. (2018). *Mengenal Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.
- Saugi, Wildan & Sumarno. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.2 (2): 226-238.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tim Penggerak PKK Pusat. (2015). *Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Tim Penggerak Pusat. (2016). Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
- Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1(2): 33-43.